

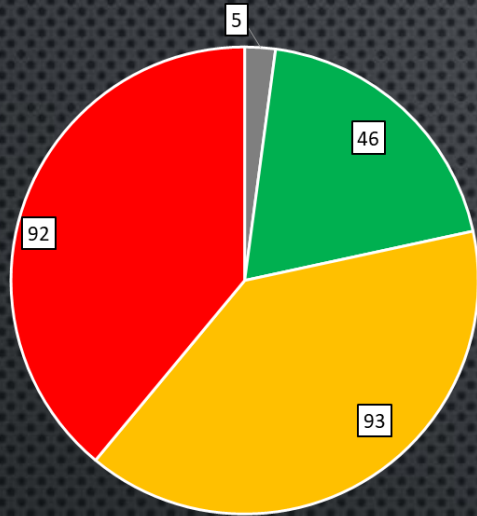


# CAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

**BAPPERIDA PROVINSI PAPUA**

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024  
Jakarta, 2 Mei 2024

# OVERVIEW PROGRES PENCAPAIAN SDGs



■ Tidak Relevan
 ■ Tercapai
 ■ Akan tercapai/membaik
 ■ Perlu Perhatian Khusus

## Pilar Sosial

78 Indikator data tersedia dari 94 Indikator

25.64

67.95

6.41

## Pilar Ekonomi

45 Indikator data tersedia dari 63 Indikator

40.00

44.44

15.56

## Pilar Lingkungan

37 Indikator data tersedia dari 56 Indikator

8.11

40.54

51.35

## Pilar Hukum dan Tata Kelola

13 Indikator data tersedia dari 18 Indikator

38.46

46.15

15.38

Capaian SDGs Papua Tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara target Nasional dan target dalam dokumen RAD SDGs Papua Tahun 2019-2023

231 Indikator relevan yang dievaluasi dari 236 indikator kewenangan Provinsi

Terdapat 46 indikator (19,91%) yang telah mencapai target dan terlihat Indikator Pilar Ekonomi dan Hukum & Tata Kelola yang pesat kemajuannya

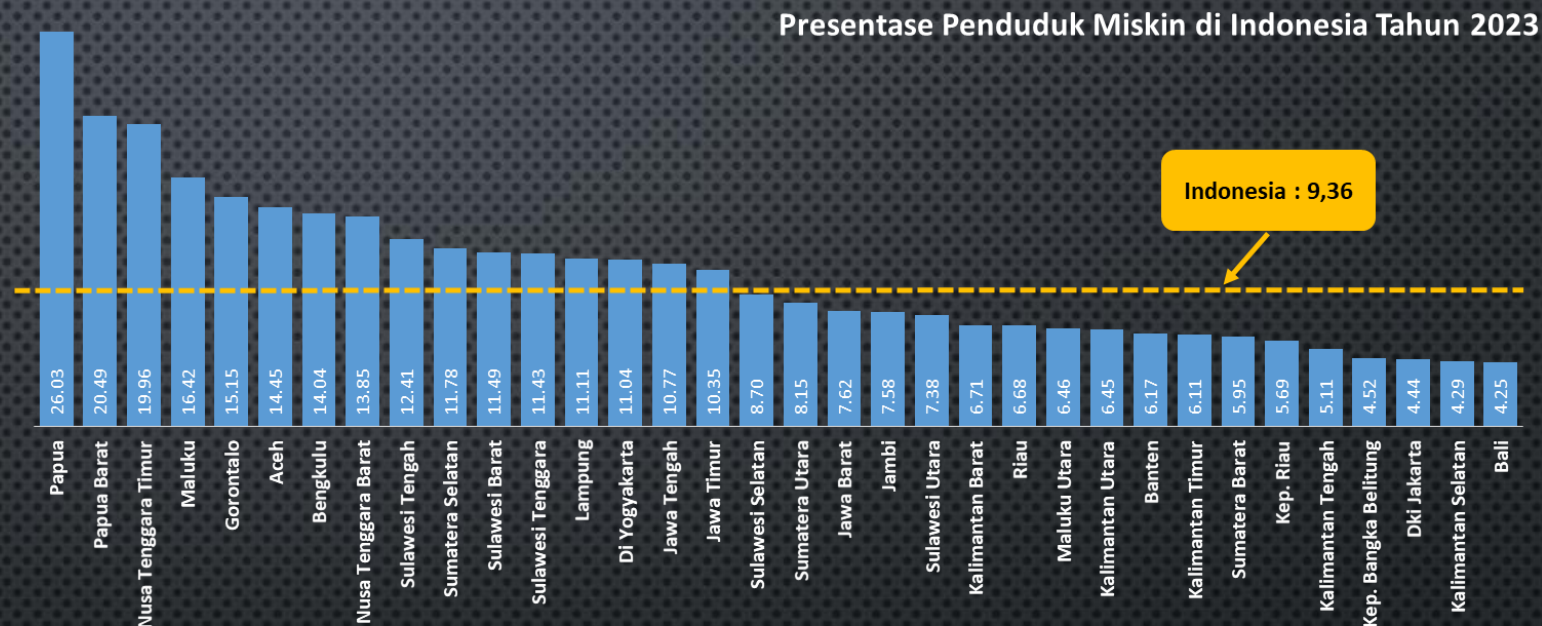
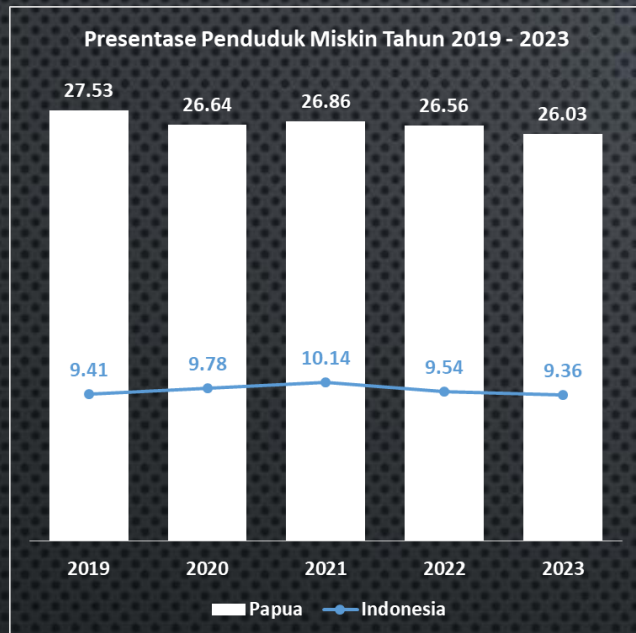
Kategori akan tercapai/membaik berjumlah 93 Indikator (40,26%)

Kategori perlu perhatian khusus berjumlah 93 Indikator (40,26%)





# PENCAPAIAN SAAT INI DAN PERMASALAHAN/TANTANGAN

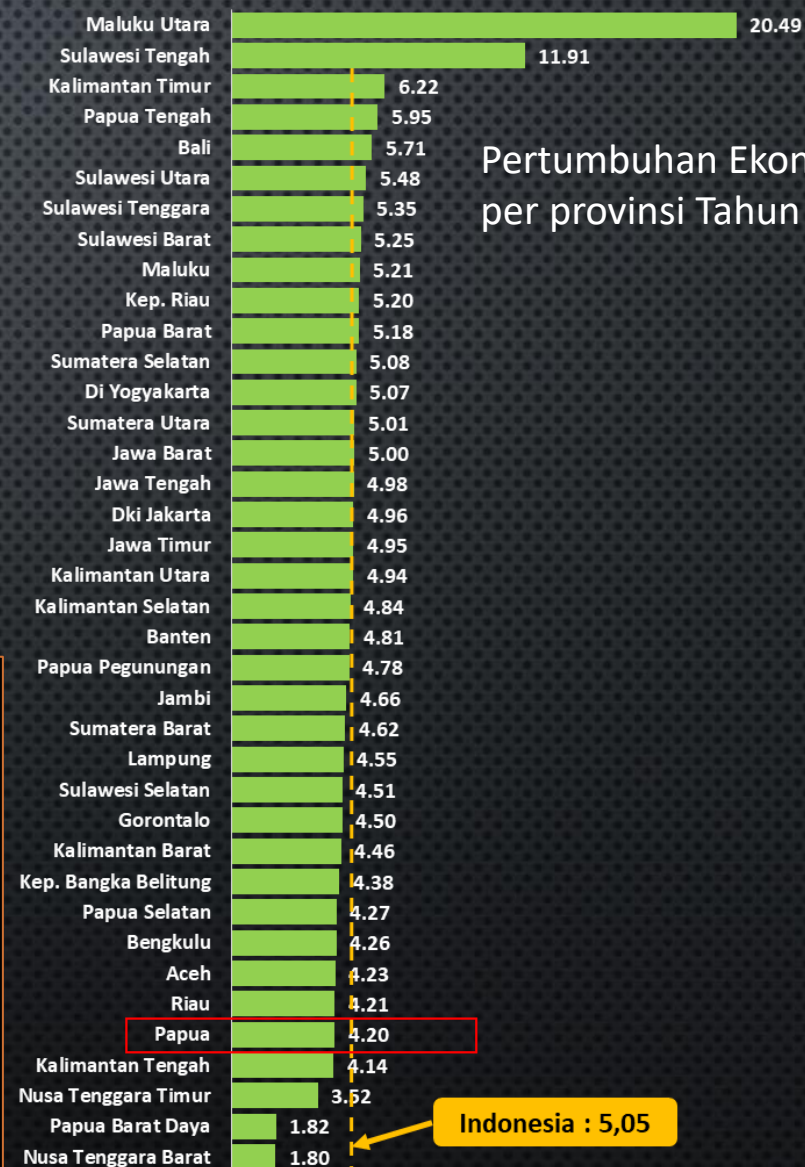
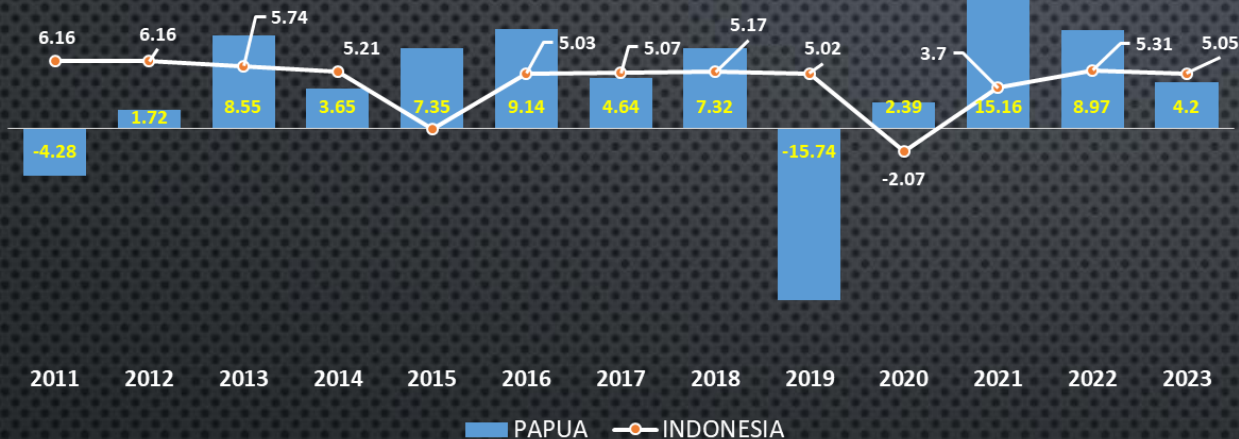


- Presentase penduduk miskin Provinsi Papua mengalami trend penurunan hingga tahun 2023 (26,03%) namun secara nasional masih menjadi Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. (Angka Nasional 9,36%)
- Permasalahan/Tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua antara lain 1). Konektivitas dan Akseibilitas antar wilayah masih terbatas, 2). Akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih terbatas, 3). Tingkat kesenjangan antar wilayah (terutama pada daerah pegunungan), 4) stabilitas harga komoditas konsumsi penduduk miskin dan kebutuhan konsumsi non-makanan seperti rumah, listrik, BBM, sanitasi dll masih terbatas, 5) belum maksimalnya pendataan penduduk miskin, dan 6) Program perlindungan dan jaminan sosial masih sangat terbatas.



# PENCAPAIAN SAAT INI DAN PERMASALAHAN/TANTANGAN

Pertumbuhan Ekonomi (%)



Pertumbuhan Ekonomi  
per provinsi Tahun 2023

Indonesia : 5,05

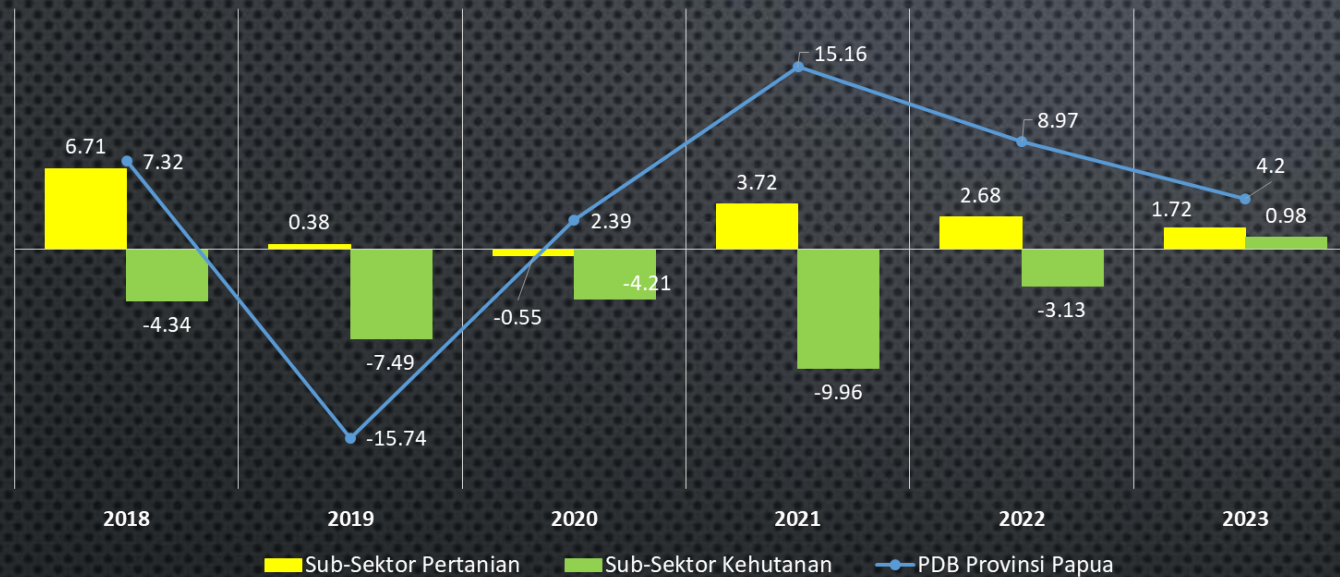
- Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua sangat didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pulau Papua Tahun 2022, kedua sektor tersebut tidak lagi berada pada wilayah Provinsi Papua sehingga sangat berpengaruh pada menurunnya angka pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2022 dan 2023
- Kontribusi beberapa sektor lainnya seperti Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagai penunjang perekonomian daerah juga mengalami penurunan sejak pandemic covid 19
- Pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi lokal juga belum maksimal berjalan dan mendukung angka pertumbuhan ekonomi Papua hingga tahun 2023



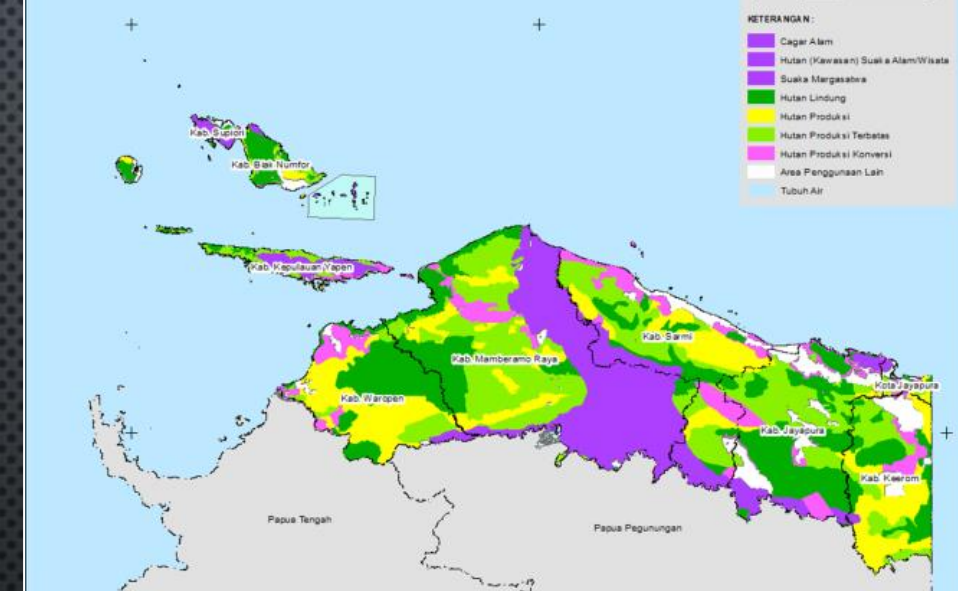


# PENCAPAIAN SAAT INI DAN PERMASALAHAN/TANTANGAN

Perkembangan PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan pada PDRB ADHK 2010 Tahun 2018 - 2023 (%)



Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua SK.6632/MENLHK Tahun 2021

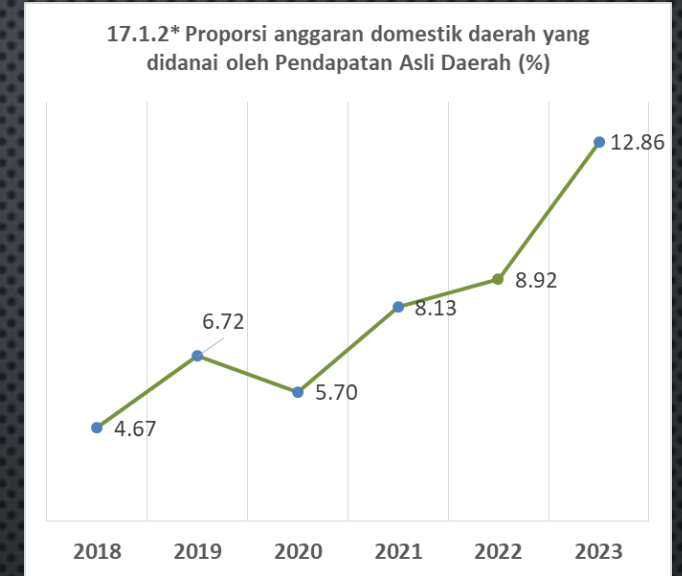
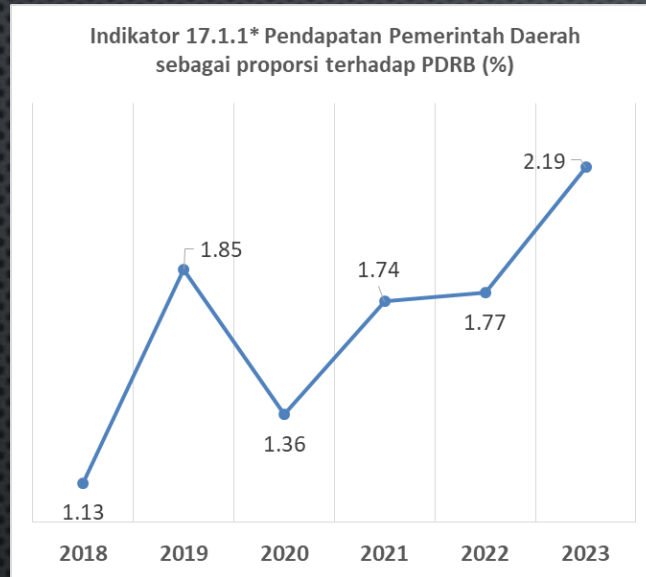


- Luas kawasan hutan saat ini masih mencapai 92,50% dari luas Provinsi Papua dan menunjukkan bahwa Hutan di Papua masih memiliki kondisi tutupan hutan yang sangat baik di Indonesia.
- Dari sisi kontribusi sub-sektor berbasis Lahan (Kehutanan dan Pertanian) terhadap PDB Papua, menunjukkan bahwa nilai nominal PDRB sub-sektor kehutanan tahun masih sangat minim sehingga belum optimal mendukung PDRB Papua hingga saat ini

No	Fungsi Hutan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Konservasi	1.694.155,56	22,32%
2.	Hutan Lindung	1.898.249,57	22,66%
3.	Hutan Produksi Tetap	1.384.041,99	15,56%
4.	Hutan Produksi Terbatas	2.077.684,06	24,62%
5.	Hutan Produksi Konversi	606.039,57	7,33%
<b>Total Kawasan Hutan</b>		<b>7.660.170,75</b>	<b>92,50%</b>
6.	Areal Penggunaan Lain	611.123,99	7,37%
7.	Perairan	10.764,79	0,13%
<b>Total Kawasan Non Hutan</b>		<b>621.888,78</b>	<b>7.50%</b>
<b>Jumlah</b>		<b>8.282.059,53</b>	<b>100,00%</b>



# PENCAPAIAN SAAT INI DAN PERMASALAHAN/TANTANGAN



- Ketiga indikator dalam Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya menunjukan trend fluktuatif meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2023, namun belum dapat mencapai target nasional
- Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain perlu adanya penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum optimalnya kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah, masih kurangnya pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak dan belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan potensi pendapatan daerah. Selain itu, penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua perlu dikelola secara efisien, efektif, transparan, taat pada peraturan perundang undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan pada OAP dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.





# SINGKRONISASI TARGET CAPAIAN TPB PAPUA 2024-2029 DENGAN RIPP TAHUN 2022-2041 & RPD 2024-2026



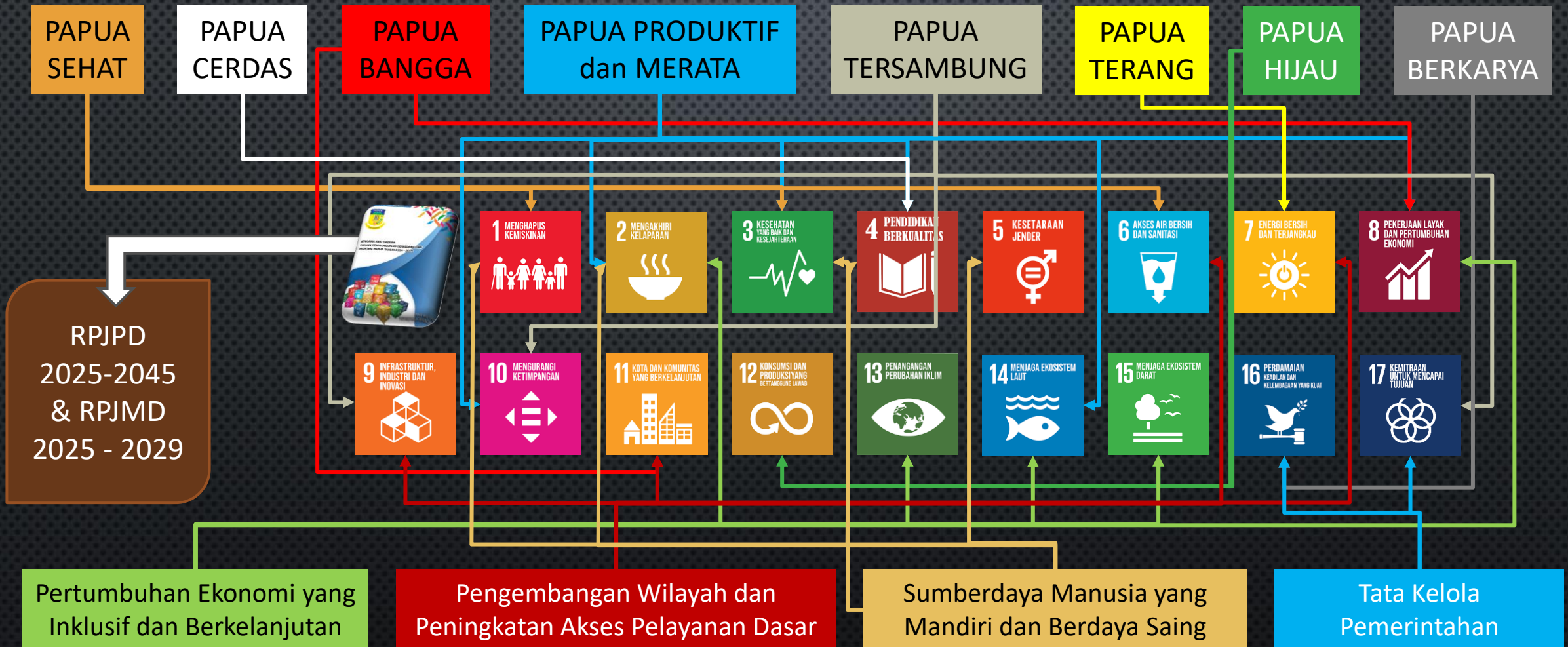
Sementara Proses PERGUB

POKJA RAD TPB  
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

# TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs



## RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA (RIPP) TAHUN 2022 - 2041



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2026



# TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs



## TARGET

- Percepatan Finalisasi RAD TPB Papua tahap II berdasarkan PERPRES 111 Tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi Papua Tahun 2024 – 2029
- Mengsinergikan Tujuan dan Target TPB Provinsi Papua dengan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui penyusunan dokumen KLHS RPJPD / KLHS RPJMD Provinsi Papua
- Mengintegrasikan target capaian Indikator TPB kedalam target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Renstra PD
- Meningkatkan keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan pencapaian target indikator TPB
- Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan setiap tahun untuk mengukur capaian target indikator TPB dan

## ARAH KEBIJAKAN

- Menetapkan Tujuan dan Target prioritas TPB Provinsi Papua yang searah dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- Meningkatkan peran kabupaten/kota dalam proses pencapaian target tahunan indikator-indikator TPB yang menjadi prioritas setiap daerah
- Membangun kerjasama dengan para pihak terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap tujuan dan target TPB
- Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri setempat untuk pembentukan SDGs Centre guna membantu pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan dan moneyv TPB

# PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SDGs



## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

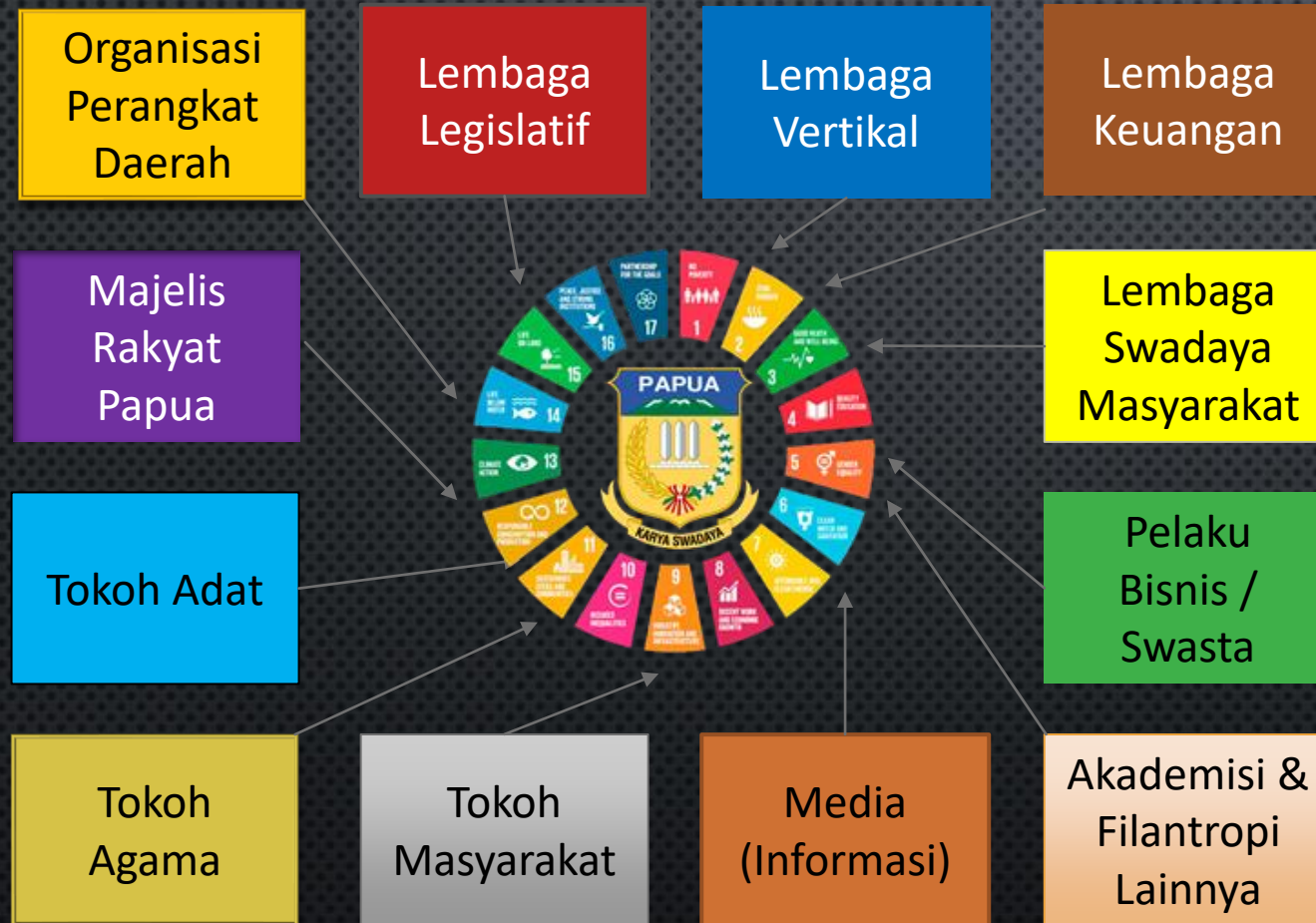
- Proses Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TPB periode 2019 – 2023 sementara dilaksanakan bersamaan dengan proses Penyusunan dokumen RAD TPB tahap II tahun 2024 – 2029
- Hasil pemantauan dan evaluasi ini juga sekaligus menjadi baseline data untuk penentuan target capaian tahun 2024 – 2029, yang kemudian akan digunakan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD tahun 2025 – 2029
- Dari 9 Kabupaten/Kota, baru 1 kabupaten (Kabupaten Supiori) yang berinisiatif untuk melaksanakan penyusunan RAD TPB Kabupaten Supiori Tahun 2023 – 2027 dan sudah mulai melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi di tahun 2024

## PELAPORAN

- Laporan capaian TPB Tahun 2023 masih sementara dilakukan dan sedikit mengalami keterlambatan dikarenakan berbagai proses percepatan penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu yang sama dan supporting system yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung sistem tata kelola Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB)
- Kabupaten Supiori telah melakukan pemantauan dan evaluasi capaian TPB tahap 1 dan masih sementara dilakukan pendampingan dalam penyelesaian dokumen laporan tersebut



# PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN



- Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Papua saat ini masih berfokus pada peran Pemerintah Daerah dan beberapa Lembaga Mitra Pembangunan (LSM dan Lembaga Donor).
- Keterlibatan para pelaku usaha/bisnis dan beberapa lembaga Keuangan mulai terlihat sejak proses penyusunan dokumen RAD TPB tahap II dilakukan.
- Saat ini, BAPPERIDA Provinsi Papua telah membangun forum komunikasi pelaksanaan TPB Provinsi Papua yang melibatkan berbagai mitra pembangunan daerah, pihak swasta, pelaku bisnis dan pihak perbankan

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



## Kesimpulan

- Ketersediaan data dan kesiapan SDM dalam pengelolaan data SDGs terpusat belum berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi capaian indikator SDGs. Demikian juga dengan ketersediaan beberapa data sekunder dari BPS maupun statistik kementerian atau lembaga sebagai acuan untuk mengukur capaian indikator kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- **Pemanfaatan Indikator Metadata II berdasarkan PERPRES 111 Tahun 2022 belum dapat dimanfaatkan dalam proses perumusan tujuan pembangunan berkelanjutan pada saat penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD**
- Beberapa indikator nasional sesuai indikator global belum dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## Rekomendasi

- **Perlu adanya kebijakan Pusat terkait pemanfaatan indikator metadata II TPB dalam penyusunan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD sehingga target capaian indikator TPB berdasarkan metadata II ini sudah dapat disinergikan dengan beberapa Perencanaan Daerah yang saat ini sementara dilakukan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota**
- Mengembangkan mekanisme keterlibatan Filantropi dan bisnis serta akademisi dalam melaporkan capaian indikator SDGs yang telah dilaksanakan kepada pemerintah daerah
- Perecepatan pembentukan SDGs Centre melalui dukungan mitra pembangunan dan perguruan tinggi





# TERIMA KASIH

BAPPERIDA PROVINSI PAPUA – TAHUN 2024